JAWABAN TUGAS 2

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **SOSI4408.6/Sosiologi Politik 6**
Tugas : 2

Pertanyaan 1/2:

Masyarakat modern dipandang sebagai masyarakat yang memiliki kompleksitas masalah sosial sehingga sistem politik juga memiliki banyak perubahan, di antaranya ialah kemunculan partai politik yang dianggap sebagai salah satu reformasi di bidang sistem politik. Namun seiring perkembangan zaman partai politik juga dihadapkan sejumlah masalah seperti korupsi dan sistem pengkaderan yang tidak memadai. Berikanlah pendapat saudara mengenai masalah ini. Uraikan terlebih dahulu hal-hal yang melatar-belakangi muncul partai politik.

Jawaban 1/2:

Dalam referensi [1], terkait dengan partai politik dibahas dalam **Modul 05**, [hal. 5.3 – 5.23], sedangkan mengenai latar belakang berdirinya partai-partai politik diburaikan dalam **Modul 05, Kegiatan Belajar 1**, [hal. 5.4 – 5.11]. Menurut referensi [1], kemunculan partai-partai politik umumnya dilatar-belakangi oleh sistem pemerintahan negara yang berbasis perwakilan (*representative government*). Sedangkan menurut referensi [2] kemunculan partai-partai politik dilatar-belakangi oleh ke-aneka-ragam-an (*diversity*) kepentingan, ideologi dan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Seringkali partai-partai politik muncul karena ke-tidak-setuju-an pada suatu kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah, atau ke-tidak-sepakat-an pada pilihan-pilihan (politik) yang ada. Berbagai faktor sosial, ekonomi dan budaya, juga peristiwa bersejarah dan perubahan pemegang tampuk kekuasaan (seperti contohnya pada peristiwa bersejarah Reformasi 1998) dapat juga menjadi latar-belakang munculnya partai-partai politik. Setelah kemunculannya, partai-partai politik kemudian menghadapi berbagai permasalahan.

Menurut referensi [3(a)] setidaknya ada 4 (empat) aspek yang menyebabkan partai-partai politik – setelah muncul – kemudian menghadapi masalah dis-fungsional. Keempat aspek itu adalah: (1) sistem internal partai yang tidak demokratis, (2) perundang-undangan yang mengatur partai politik, (3) literasi demokrasi dan politik dan (4) masalah pendanaan. Sedangkan menurut hemat saya, berdasarkan referensi [2], sedikitnya ada 7 (tujuh) tantangan masalah yang umumnya dihadapi oleh kebanyakan partai politik setelah berdiri dengan berbagai latar-belakangnya, yaitu: (1) korupsi, (2) rekrutmen, (3) perpecahan internal, (4) adaptasi, (5) ke-tidak-setia-an pemilih, (6) pencitraan/persepsi publik dan (7) kesulitan finansial. Ketujuh tantangan permasalahan yang dihadapi oleh umumnya partai politik setelah kemunculannya, dapat diuraikan secara ringkas, sebagai berikut:

- (1) **Korupsi.** Keberhasilan partai-partai politik dalam mencapai visi-misi-nya membutuhkan biaya besar. Partai-partai politik tidak boleh memiliki badan usaha atas nama partai, sehingga sumber pendanaan hanya dimungkinkan dari pribadi-pribadi, baik anggota mau pun simpatisan. Pribadi-pribadi anggota partai politik yang juga tidak memiliki usaha, ketika kemudian mendapat amanah menduduki suatu jabatan publik atau jabatan politik dengan dukungan dari partai-nya, akan berusaha mencari sumber dana untuk di-*setor*-kan ke partai-nya. “*Setoran*” untuk partai inilah yang seringkali mendorong (lebih tepatnya: menjerumuskan) seorang pejabat publik atau politisi yang berasal dari partai politik terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tentu saja keterlibatan oknum kader partai politik dalam tindak pidana korupsi akan merusak citra dan reputasi partai politik yang bersangkutan.
- (2) **Rekrutmen.** Kebanyakan partai politik menghadapi masalah ketika berupaya me-rekrut anggota masyarakat yang potensial untuk menjadi kader politisi dan terlibat dalam politik. Hal ini mungkin disebabkan karena rendahnya kepercayaan publik pada politisi, kerja-kerja politik yang melelahkan, dan kesempatan mengembangkan karier yang terbatas. Umumnya partai-partai politik akan menghadapi dilemma, antara “*penyaringan*” kader yang berkualitas dan “*penjaringan*” suara yang sebanyak-banyaknya pada saat pemilihan umum.
- (3) **Perpecahan Internal.** Perselisihan dan saling ke-tidak-sepaham-an di antara tokoh-tokoh partai politik sering mengarah ke perpecahan. Ketika terjadi seperti itu, tokoh yang merasa kurang mendapat dukungan internal akan meninggalkan partai-nya diikuti oleh para pendukungnya, kemudian mendirikan partai baru. Tentu saja perpecahan seperti akan melemahkan posisi partai dalam menghadapi kompetisi dalam pemilihan umum.
- (4) **Adaptasi.** Setiap saat terjadi perubahan, baik regulasi terkait partai politik (misalnya UU PEMILU, UU Partai Politik, dan lain-lain), mau pun perubahan demografi, misalnya peralihan generasi pemilih, dari generasi “*Baby Boomer*” ke generasi X, kemudian generasi *Milleneal*, dan sekarang ada generasi Z. Partai politik yang tidak dapat ber-adaptasi akan kehilangan pemilihnya, bahkan ujung-ujungnya bisa jadi akan kehilangan eksistensinya sebagai partai politik.
- (5) **Ke-tidak-setia-an Pemilih.** Fenomena ke-tidak-setia-an pemilih terjadi pada Pilleg yang baru lalu pada tanggal 14 Februari 2024. Konstituen yang sudah “dirawat” selama 5 (lima) tahun oleh partai-partai politik, bisa pindah ke lain hati pada hari H Pilleg, gara-gara terjadi “*pem-bom-an*” dengan *money politics* dan politik BANSOS.
- (6) **Pencitraan/Persepsi Publik.** Pencitraan yang buruk melalui media, baik media sosial mau pun media *main-stream*, bisa merusak citra partai, dan menghasilkan persepsi publik yang merugikan secara elektoral bagi partai yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan komunikasi politik yang baik dan ke-humas-an (*public relation*) yang dirancang dengan

seksama, lebih dari sekedar kampanye biasa, untuk tetap menjaga *marwah* dan martabat partai politik. .

- (7) **Kesulitan Finansial.** Partai politik adalah organisasi non-profit yang tidak mencari keuntungan finansial dan sama-sekali tidak bersifat komersial. Secara finansial hanya bergantung pada iuran anggota dan subsidi pemerintah, serta donasi dari berbagai sumber. Oleh karena itu wajar jika partai politik banyak yang selalu mengalami kesulitan finansial, terutama ketika menghadapi Pemilu, ketika harus mempersiapkan pendanaan untuk kampanye, untuk saksi-saksi di TPS, serta biaya operasional dan infrastruktur seperti kantor-kantor pusat, wilayah, cabang dan ranting. Sebaiknya partai-partai politik memiliki sumber pendanaan yang aman, baik aman dari pelanggaran hukum yang berlaku mau pun aman dari tekanan kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Atau bisa juga mengumpulkan dana abadi, sehingga bisa lebih aman untuk jangka panjang. Tanpa sumber pendanaan yang aman, partai-partai politik rentan terjebak pada masalah (1), yaitu korupsi.

Untuk menghadapi ketujuh tantangan masalah di atas, diperlukan kepemimpinan strategis dari partai politik, reformasi organisasi, serta komitmen pada transparansi dan akuntabilitas. Ini akan menjadi masalah, karena sebagian besar partai politik di Indonesia sangat bergantung pada kepemimpinan kharismatik dari seorang tokoh saja, yang berperilaku sebagai “pemilik partai” (*party owner*).

Pertanyaan 2/2:

Jika kita mengamati kondisi partai di Indonesia, tampak bahwa partai politik lebih memiliki kekuatan dibanding negara. Negara justru besar didominasi dan digerakkan oleh orang partai yang konsekuensinya tidak jarang unsur kepentingan partai lebih besar daripada kepentingan negara dan rakyat. Apakah anda setuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan anda secara logis dengan menyertakan referensi yang menjadi rujukan.

Jawaban 2/2:

Saya tidak sependapat. Untuk Indonesia yang menganut sistem multi-partai, tidak mungkin suatu partai politik memiliki kekuatan yang besar, karena selalu harus berbagi kekuasaan (*power sharing*) dengan sesamanya partai politik. Belum lagi jika ada kelompok-kelompok non-partai politik yang berperilaku sebagai kelompok penekan dan kelompok kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam referensi [3(e)]. Bisa jadi kekuatan atau kekuasaan partai politik tampak lebih besar dari negara pada sistem politik seperti di Cina, di mana hanya ada satu partai politik, yaitu Partai Komunis Cina (PKC) yang mendominasi kekuasaan negara, sebagaimana dijelaskan dalam referensi [3(d)]. Walau pun sedikitnya ada 8 (delapan) partai-partai politik kecil di Cina, PKC me-

monopoli kekuasaan politik, sehingga tampak seolah-olah lebih besar kekuatan dan kekuasaannya daripada negara Cina itu sendiri.

Di Amerika Serikat saja, sebagaimana dijelaskan dalam referensi [3(c)], walau pun menganut sistem multi-partai, tapi sistem politik-nya di-dominasi oleh hanya 2 (dua) partai politik, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat, sehingga tidak mungkin partai politik mempunyai kekuatan atau kekuasaan politik yang lebih besar daripada negara. Kedua partai politik besar di Amerika Serikat itu harus selalu berbagi kekuasaan pemerintahan negara satu dengan yang lainnya. Jika Partai Republik memenangkan PEMILU, maka Partai Demokrat akan menjadi oposisi, dan sebaliknya, sehingga selalu terjadi *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

Apalagi di Indonesia. Besarnya kekuatan partai politik hanya mithos belaka. Dalam pemilihan kepala-kepala daerah, misalnya, dimungkinkan warga negara independen non-partai-politik untuk mengajukan diri sebagai calon. Jika terpilih, maka calon independen ini akan berkuasa tanpa bergantung pada partai politik mana pun. Selain itu, komponen-komponen kekuasaan negara yang membentuk kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sebagian besar adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang juga (seharusnya) “steril” dari pengaruh partai politik. Kekuatan militer dan polisi pun “netral”, yang seharusnya tidak membawa-bawa kepentingan politik dari partai politik yang mana pun.

Kekuatan politik yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh partai politik adalah pada lembaga legislatif, khususnya DPR, itu pun harus berbagi kekuasaan dengan DPD yang anggota-anggotanya (para senator) adalah wakil-wakil rakyat daerah provinsi yang bebas partai politik. Di kabinet yang dibentuk dengan hak prerogatif Presiden, ada sebagian anggotanya (para menteri) yang berasal dari partai politik, tapi status-nya adalah pembantu Presiden, dan Presiden-nya sendiri bisa saja non-partai politik, sehingga tetap harus bekerja untuk kepentingan negara, bukan kepentingan partai. Presiden Joko Widodo memang pernah “di-klaim” oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sebagai “petugas partai”. Tapi pada akhirnya Presiden Joko Widodo pun berhasil melepas stigma “petugas partai”, dengan *mbalelo* pada Ketua Umum Partai-nya, kemudian mendukung Capres yang tidak diusung oleh partai-nya, dengan merelakan putera-nya sebagai Cawapres, yang akhirnya ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

- [1] Arie S. Soesilo, Dodi Prayogo dan Purwatiningsih, “*Sosiologi Politik*”, Modul 1 – 9, SOSI4408, Edisi 2 [Agustus 2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] ChatGPT, Aplikasi *Chatting* berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.
- [3] Sumber-sumber *on-line*:
 - (a) <https://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/94> diakses tgl. 12 Mei 2024
 - (b) Makalah-makalah dalam format .pdf yang dapat diunduh dari:

[https://scholar.google.co.id/scholar?
q=masalah+partai+politik+di+indonesia&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart](https://scholar.google.co.id/scholar?q=masalah+partai+politik+di+indonesia&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart)
diakses tgl. 12 Mei 2024

- (c) <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7225161/dikenal-sebagai-negara-demokrasi-terbesar-mengapa-as-hanya-memiliki-dua-partai> di-akses tgl. 12 Mei 2024
- (d) https://web.archive.org/web/20150329021437/http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/29/c_13851746.htm di-akses tgl. 12 Mei 2024
- (e) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-13434-2_25 di-akses tgl. 12 Mei 2024